

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ukraina menjadi sebuah negara berdaulat dan independen secara langsung melahirkan perubahan penting yang berkaitan dengan identitas nasional juga politik luar negeri mereka. Perdebatan panjang posisi Ukraina dalam sistem internasional melahirkan kontestasi politik yang lebih luas, dimana situasi ini ikut mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri banyak negara hingga organisasi internasional dalam perkembangannya. Sebagai sebuah negara yang belum memiliki daya keamanan, pertahanan serta ekonomi yang terbilang kuat, sistem perimbangan kekuatan menempatkan Ukraina dalam dua kutub kekuatan yang saling bersaing.

Rivalitas pengaruh klasik antara poros Barat dan Timur santer terlihat sejak lama di Ukraina, bahkan isu kebipolaritasan Ukraina telah muncul pada awal periode negara ini mendeklarasikan kemerdekaannya¹. Kebebasan ideologi yang menjangkiti Eropa Timur seiring dengan runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991 melahirkan kebimbangan besar bagi preferensi politik luar negeri Ukraina; akankah memilih untuk tetap mempertahankan kedekatan dengan Rusia—sebagai negara bekas Uni Soviet dengan *power* paling besar juga atas pertimbangan sisi historis sebagai sesama negara pecahan Uni Soviet, atau menjalin dan bergabung dengan aliansi baru bersama dengan negara-negara Eropa Barat dalam payung persatuan Uni Eropa ataupun NATO yang kental dengan nuansa liberalisme *à la* Amerika Serikat.

Persaingan hegemoni poros Barat dan Timur dalam upaya menjadikan Ukraina sebagai wilayah strategis perihal penyebarluasan skema kebijakan transnasional mereka, ikut memberikan andil dalam mempengaruhi keutuhan bangsa Ukraina. Situasi ini kelak akan menimbulkan konflik internal bagi Ukraina yang membagi opini publik kedalam dua prinsip yang saling berkontradiksi. Kemudian, dengan diiringi pergantian rezim pemerintahan, perbedaan prinsip tersebut ikut menyertai prosesi politik terburuk namun paling revolusioner sepanjang sejarah kemerdekaan Ukraina.

¹ Ukraina resmi merdeka pada 24 Agustus 1991. Hubungan kerjasama dan dialog awal antara Ukraina dengan poros Barat dimulai ketika bergabungnya Ukraina pada tahun 1992 dengan *North Atlantic Cooperation Council* (saat ini bernama: *Euro-Atlantic Partnership Council*) (Lebih lanjut dapat dilihat: <https://mfa.gov.ua/en/about-ukraine/cooperation-international-organizations/nato>).

Selama bertahun-tahun sejak merdekanya Ukraina di tahun 1991, diiringi dengan pergantian rezim penguasa dari tahun-ke-tahun, Ukraina belum dapat mandiri dalam menunjukkan pembangunan kualitas hidup masyarakatnya secara signifikan. Mulai dari Revolusi Oranye² pada tahun 2004 hingga *Euromaidan* yang akan penulis bahas dalam penelitian ini merupakan sebuah pembuktian bagaimana rendahnya tingkat konsolidasi pemerintah Ukraina bagi rakyatnya, tentunya situasi ini akan melemahkan kesatuan negara dan bangsa. Alasan utama yang mengancam integrasi bangsa Ukraina meliputi; faktor etnis, situasi regional, pola pikir masyarakat, budaya, hingga kelemahan institusi pemerintah. Untuk itu, tugas terpenting pemerintah Ukraina dalam mentransformasikan bangsa menjadi lebih modern perlu untuk memperhatikan pembangunan manusia dan pelestarian integrasi nasional sehingga akan mengiringi pembentukan kekuatan, kesatuan dan keutuhan Ukraina yang notabene masih menjadi sasaran skema perebutan ideologi dalam sistem politik internasional.

Salah satu tugas terpenting dari proses transformasi modern di Ukraina adalah konsolidasi masyarakat. Reformasi politik dan juga pembentukan kerangka hukum yang baru diperlukan untuk mengatasi permasalahan perkembangan Ukraina yang stagnan dalam kualitas hidup masyarakat—bahkan menurun sejak runtuhnya Uni Soviet. Kondisi masyarakat Ukraina yang sangat beragam dengan variasi etno-sosio-budaya yang berbeda-beda semestinya memberikan sudut pandang tersendiri bagi sikap yang akan diambil pemerintah Ukraina, hal ini yang menjadikan penerapan aliansi tunggal dalam sistem politik internasional menjadi kurang relevan dalam membangun bangsa Ukraina yang lebih modern. Harmonisasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Ukraina merupakan masalah mendesak, sehingga memerlukan solidaritas yang kuat agar dapat menyelesaikan permasalahan integrasi nasional Ukraina.

² Revolusi Oranye (*Orange Revolution*) berlangsung pada November 2004 hingga Januari 2005. Aksi protes ini merupakan bentuk ketidakpercayaan masyarakat atas hasil Pemilu Presiden yang ditenggarai penuh dengan kecurangan dan intervensi dari Rusia dibawah Vladimir Putin. Revolusi Oranye berperan penting dalam membentuk pola pikir masyarakat Ukraina dalam menilai dirinya sendiri dan mempengaruhi identitas nasional mereka. Sejak Ukraina merdeka di tahun 1991, batas-batas politik, sosial, budaya, hingga ekonomi mereka dengan Rusia masih belum memiliki kejelasan. Sepintas, Revolusi Oranye yang berlangsung damai tampaknya kurang mempengaruhi situasi geopolitik, namun satu dekade berikutnya opini tersebut terbantahkan seiring dengan meletusnya *Euromaidan* sehingga melahirkan iklim “Perang Dingin” baru dalam sistem politik internasional benua Eropa (Lebih lanjut dapat dilihat: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/how-ukraines-orange-revolution-shaped-twenty-first-century-geopolitics/>)

Situasi sistem politik internasional Eropa Timur yang progresif sejak keruntuhan Uni Soviet, dapat menjadi faktor utama keberhasilan penerapan persatuan dan solidaritas bangsa bagi negara-negara pecahan Uni Soviet. Namun dalam perspektif yang berbeda, situasi tersebut berpotensi melahirkan konflik yang berimplikasi terhadap masyarakat secara luas. Sudut pandang masyarakat Ukraina yang terbagi kedalam dua (2) pandangan—memilih untuk aliansi dengan poros Barat atau poros Timur, perlu diperhitungkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan politik luar negeri Ukraina. Dalam pendekatan tradisional, terbentuk kecenderungan dualitas moral yang keterkaitannya sangat kontradiktif di Ukraina. Untuk masyarakat yang mendiami wilayah Barat Ukraina, perspektif moralitas yang berkembang adalah kebebasan, individualisme, kesatuan, patriotisme nasional, pragmatisme, dan logika dalam sistem internasional yang anarki. Sementara untuk masyarakat yang mendiami wilayah Timur Ukraina, mayoritas perspektif berkaitan dengan kebebasan kolektif, persatuan etnis, dan perserikatan berbasis kesamaan ideologis. Perspektif yang saling berkontradiksi ini pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku ekonomi, sosial, politik dan budaya Ukraina dalam sistem politik internasional. Sebab, kedua kecenderungan moral yang berlawanan tersebut, tidak diperhitungkan pemerintah Ukraina dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri mereka.

Ukraina yang merupakan sebuah negara yang menjunjung prinsip kesatuan dalam menjalankan pemerintahannya, dapat dimaknai sebagai dua mata pisau. Disatu sisi, apabila pemerintah mampu dan memiliki kapabilitas untuk membangun kualitas hidup rakyatnya secara mandiri dan kompeten, maka prinsip kesatuan memiliki andil dalam membentuk nasionalisme yang semakin baik. Namun di sisi lainnya, negara kesatuan dapat membentuk situasi otoritarianisme, kediktatoran, pengabaian terhadap komunitas etno-teritorial, dan berpeluang besar dalam membentuk kelompok separatisme dan ekstrimisme. Keheterogenan masyarakat Ukraina—komposisi polietnis, ekonomi-sosial-politik-budaya, yang terbentuk melalui sejarah sejarahnya kurang relevan untuk diterapkan dalam sistem politik internasional yang kontemporer. Krisis kesatuan yang menjangkiti Ukraina, dapat menjadi faktor vital dalam memicu sebuah konflik. *Euromaidan* hadir sebagai salah satu momentum besar meletusnya konflik internal Ukraina dalam memprakarsai sebuah revolusi pemerintahan yang baru.

Euromaidan adalah gerakan protes massal di Ukraina yang dimulai pada 21 November 2013 hingga berakhir pada 22 Februari 2014—diakhiri ketika Presiden Ukraina dukungan Rusia, Viktor Yanukovich, pergi meninggalkan Ukraina. *Euromaidan* merupakan bentuk langsung atas ketidakpuasan masyarakat Ukraina terhadap sikap Presiden Ukraina yang menjabat kala itu; Viktor Yanukovich, dimana dalam sikap kepemimpinannya menolak untuk menandatangani perjanjian kesepakatan kerjasama yang tertuang dalam *Ukraine–European Union Association Agreement* pada pertemuan yang berlangsung di Vilnius, Lithuania tanggal 29 November 2013. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan antara Ukraina, Uni Eropa, EAEC (*European Atomic Energy Community*), beserta ke-28 negara anggota Uni Eropa³ (Traynor & Grytsenko, 2013). Pembatalan penandatanganan *Ukraine–European Union Association Agreement* oleh Viktor Yanukovich mendapat pertentangan keras dari mayoritas masyarakat Ukraina kala itu yang memiliki pola pikir perubahan, tentunya dalam hal ini mereka ingin melepaskan diri dari bayang-bayang pengaruh Rusia pada intinya dan menjalin aliansi baru dengan poros Barat dengan harapan tercapainya peningkatan faktor-faktor kualitas kelayakan hidup.

Mayoritas masyarakat kala itu beranggapan bahwa menjalin hubungan kerjasama dengan poros Barat melalui Uni Eropa, NATO, ataupun aliansi poros Barat lainnya akan memodernisasikan serta memperbaiki kualitas hidup di Ukraina yang terbagi kedalam 4 (tiga) isu utama; ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Untuk itu, aksi demonstrasi lahir sebagai bentuk ketidaksetujuan atas sikap Viktor Yanukovich. Titik awal *Euromaidan* bermula dari munculnya demonstrasi di wilayah Distrik Lypky, Kiev yang berlangsung sejak keputusan Yanukovich pada akhir bulan November tahun 2013. Puncak dari demonstrasi terjadi pada 20 Februari 2014, para demonstran menggelar aksinya dengan mengelilingi Gedung Parlemen Ukraina (*Verkhovna Rada*) dengan situasi yang terbilang kondusif pada awalnya. Namun, kondisi ini berubah ketika diturunkannya pasukan spesial polisi anti huru-hara Berkut⁴ sebagai bentuk pembubaran paksa, banyak kesaksian yang menyatakan bahwa tindakan aparat kala itu terkesan agresif dan represif.

³ Ke-28 negara anggota Uni Eropa terhitung sebelum peristiwa “Brexit”.

⁴ Berkut dibentuk pada tahun 1992, pada mulanya diinisiasi sebagai pasukan polisi tugas khusus (*special purpose police*) berakar dari pemerintahan Uni Soviet. Memiliki fungsi untuk memerangi kejahatan luar biasa dan terorganisir, namun dalam perkembangannya beralih fungsi sebagai penjaga ketertiban acara-acara masal (*mass events*) seperti demonstrasi dan sebagainya. Dibawah perintah Kementerian Dalam Negeri Ukraina, pada 25 Februari 2014 Berkut resmi dibubarkan sebagai dampak dari kekerasan dan penganiayaan yang terjadi di *Euromaidan* (Lebih lanjut dapat dilihat: <https://www.bbc.com/news/world-europe-25895716>).

Seiring dengan situasi yang dirasa semakin ricuh, peserta aksi demonstrasi dipukul mundur oleh aparat hingga ke Lapangan Kemerdekaan (*Maidan Nezalezhnosti*). Dengan lokasi demonstrasi yang berpindah tempat, tidak serta-merta membuat kondisi menjadi kondusif, sebaliknya kerusuhan semakin menjadi besar dan bentrokan tidak dapat dihindarkan. Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak November tahun 2013 hingga Februari tahun 2014 secara keseluruhan menewaskan 120 orang yang terbagi kedalam; 103 orang pengunjuk rasa dan 17 orang aparat penegak hukum (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2013: 3). *Euromaidan* merupakan salah satu titik paling kritis dalam perkembangan sistem politik sejak Ukraina merdeka. Baik koalisi poros Barat, media internasional, hingga opini publik Ukraina menghadirkan *Euromaidan* sebagai revolusi demokratis dalam upaya untuk menggulingkan rezim boneka Viktor Yanukovich. Momentum *Euromaidan* memicu serangkaian peristiwa yang membuat panasnya hubungan luar negeri antara Ukraina dan Rusia—sengketa yang terjadi di Krimea hingga dukungan Kremlin terhadap kelompok separatis Rusia di Ukraina bagian timur.

Momentum *Euromaidan* menawarkan perspektif berbeda dalam pengambilan kebijakan luar negeri Ukraina selanjutnya. Momentum tersebut terbagi kedalam dua (2) tujuan yang saling melengkapi: Pertama, agar persepektif perubahan tersebut dapat diterima oleh masyarakat Ukraina secara luas—terutama masyarakat yang mendiami wilayah Timur Ukraina yang berdekatan dengan Rusia. Kedua, untuk menegaskan kembali kepada dunia internasional bahwa kategorisasi sosial berdasarkan kesamaan ideologi sekali lagi tidak relevan untuk diterapkan di Ukraina yang memiliki masyarakat dengan situasi keheterogenan yang tersebar secara luas, dalam poin ini masyarakat menekankan kepada pemerintah Ukraina untuk segera merubah posisi mereka dalam sistem politik internasional kontemporer. Dewasa ini pandangan bahwa Ukraina dapat menemukan identitas nasional mereka sebagai sebuah bangsa yang berdikari dengan memisahkan diri dari kultur budaya dan juga ideologi Rusia santer tersurat sehingga mendorong nasionalisme etnis di Ukraina. Kondisi Ukraina saat ini—periode 2014–2020 setelah *Euromaidan*, dapat direfleksikan sebagai tendensi perubahan politik, ekonomi, dan sosial secara masif. Berangkat dari keruntuhan Uni Soviet, kategorisasi sosial berlandaskan corak kesamaan ideologi menjadi tidak relevan untuk diterapkan di Ukraina. Momentum *Euromaidan* sejatinya membawa pesan integrasi nasional bangsa Ukraina secara luas, dalam situasi konflik, sebuah negara tentu membutuhkan integrasi nasional karena dapat menyatukan segala bentuk latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari kegagalan rezim Viktor Yanukovych dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan hidup mayoritas rakyat Ukraina sehingga menciptakan sebuah ancaman nasional, diikuti dengan *Euromaidan* yang berujung pada aneksasi Krimea, dan juga peperangan di Donbas maka penulis menawarkan sebuah pertanyaan utama sebagai bahan analisis, yaitu;

Apakah proses integrasi nasional dalam pembangunan bangsa Ukraina dapat diterapkan pasca-*Euromaidan* ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperluas wawasan dari studi hubungan internasional secara luas dan dapat dijadikan bahan referensi studi terkait.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus ingin memberikan analisis terhadap bagaimana momentum *Euromaidan* dapat mempengaruhi faktor integrasi bangsa dan juga posisi Ukraina dalam sistem politik internasional.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu hubungan internasional terutama yang berkaitan dengan isu integrasi nasional, perebutan pengaruh yang mengantarkan konflik (*proxy war*), dan juga posisi suatu negara dalam sistem politik internasional yang anarki.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai isu *Euromaidan* yang terjadi di Ukraina juga dampak dari isu tersebut terhadap sistem politik internasional sehingga hasil tulisan dapat diterima dengan baik di kalangan akademisi ataupun publik secara luas.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam beberapa tahun kebelakang, penelitian yang berkaitan dengan konflik Ukraina telah dipublikasikan kedalam jurnal ilmiah oleh beberapa akademisi, seperti; Yayan Sofyan (2018) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Dinamika Konflik Di Ukraina”: pembahasan menitikberatkan sejauh mana implementasi kebijakan luar negeri Rusia yang berkaitan dengan Ukraina; Rizky Rizaldi Sidiki (2016) dengan penelitian berjudul “Pengaruh Perluasan NATO Ke Eropa Timur Terhadap Konflik Ukraina (Analisis Kebijakan Pertahanan Rusia)”: dengan analisis yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pertahanan Rusia dalam merespon intervensi NATO terhadap konflik Ukraina. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis dan memberikan pembaruan (*novelty*) yaitu apakah proses integrasi nasional dalam pembangunan bangsa Ukraina berhasil dilakukan setelah meletusnya momentum *Euromaidan* dan momentum lainnya—aneksasi Krimea, perang Donbas, terjadi.

Teori pembangunan bangsa (*nation-building*) ditawarkan penulis sebagai pisau analisis dalam tujuan menjawab rumusan masalah. Teori pembangunan bangsa mulai populer dikalangan ilmuwan politik yang melihat contoh sejarah di era- 1950–1960an. Pendukung utamanya termasuk Karl Deutsch, Charles Tilly, hingga Reinhard Bendix. Teori pembangunan bangsa digunakan untuk menggambarkan proses integrasi dan konsolidasi nasional yang mengarah pada pembentukan negara-bangsa modern, dimana skema negara tersebut berbeda dengan bentuk negara tradisional yaitu seperti; negara feodal, dinasti, negara gereja, ataupun kerajaan. Østerud (1978: 117) beranggapan bahwa teori pembangunan bangsa bagi ilmu politik berkenaan dengan industrialisasi isu ekonomi dan sosial, isu tersebut diperlukan dalam menganalisis dinamika makrohistoris untuk menciptakan negara modern. Melalui teori pembangunan bangsa warga negara memiliki hak penuh dalam partisipasi politik, otoritas negara akan merangkul masyarakat dengan menawarkan beragam kewajiban sehingga membentuk jaringan sosial yang integratif. Budaya yang berkaitan dengan kepentingan otoritas negara berada diatas segalanya akan dihilangkan, kemudian digantikan dengan loyalitas terhadap entitas yang lebih besar, yaitu: kepentingan warga negara.

Stein Rokkan dalam Tilly (1975: 57) menjelaskan bahwa terdapat empat (4) aspek yang berfungsi sebagai tahap pembangunan bangsa;

1. Tahap pertama; membutuhkan unifikasi ekonomi dan budaya berskala nasional.
2. Tahap kedua; merangkul warga negara secara luas untuk turut aktif dalam program pemerintah—bisa diterapkan melalui program wajib militer, wajib belajar, dan sejenisnya. Pada tahapan ini, media turut serta berperan untuk menjembatani proses pemerintah sehingga menghasilkan skema identitas nasional yang diketahui oleh seluruh warga negara.
3. Tahap ketiga, warga negara dilibatkan secara aktif dalam sistem politik teritorial.
4. Tahap keempat, pengembangan aparatur administrasi negara. Pada tahap ini, diharapkan bahwa layanan kesejahteraan publik ditetapkan dan kebijakan nasional untuk pemerataan kondisi ekonomi dan keamanan diterapkan.

Stein Rokkan (Ibid.) berpendapat bahwa di negara-negara Eropa Barat, tahap paling awal dari proses pembangunan bangsa telah dimulai sejak Abad Pertengahan dan berlangsung hingga Revolusi Prancis. Meskipun tidak mungkin untuk menentukan dengan tepat kapan seluruh proses pembangunan bangsa selesai, dalam varian ideal, setiap tahapan berlangsung diiringi oleh tahapan sebelumnya dengan berjalan sendirinya. Hal tersebut dapat berfungsi sebagai tindakan antisipasi konflik dan juga meminimalisir isu perubahan politik secara drastis.

Diskusi mengenai teori pembangunan bangsa bersifat dinamis dalam menganalisis sebuah isu. Connor (1994: 30) menjelaskan bahwa literatur teori pembangunan bangsa disibukkan dengan isu perpecahan antara status sosial di masyarakat—bangsawan *vs.* rakyat jelata, elit politik *vs.* masyarakat sipil biasa. Tetapi teori pembangunan bangsa hampir atau sama sekali mengabaikan keragaman etnis. Menurut Connor, pengabaian tersebut merupakan kecacatan teori pembangunan bangsa, karena menurut perhitungannya hanya 9% negara-negara di dunia yang dapat dianggap homogen secara etnis.

Mengutip Smith (1986:74) menegaskan bahwa: “bahkan untuk negara yang baru terbentuk, homogenitas etnis dan kesatuan budaya adalah pertimbangan terpenting. Ketika masyarakat tersebut benar-benar plural, dibutuhkan komitmen kuat terhadap pluralisme dan toleransi budaya”. Teori pembangunan bangsa diaplikasikan dalam menjelaskan proses integrasi nasional dan juga identitas politik suatu negara. Salah satu konsep pemikiran yang dominan menganggap bahwa pembubaran budaya dan bahasa minoritas akan menimbulkan konflik baru, dimana seharusnya faktor heterogenitas budaya dapat memberikan kekuatan persatuan yang ideal di masyarakat.

Pendapat pembubaran budaya tersebut didukung oleh liberalis Inggris, Acton (1967:149) yang melihat keragaman budaya sebagai kekuatan (*power*) bagi warga negara dan sebagai upaya perlindungan terhadap tirani. Kehadiran berbagai bangsa dalam kedaulatan yang sama memberikan perlawanan terhadap sikap otoriter pemerintah yang berkembang di bawah bayang-bayang otoritas tunggal, dengan menyeimbangkan kepentingan, melipatgandakan asosiasi, partisipasi, solidaritas, dan menawarkan subjek oposisi yang membangun integrasi nasional. Bukan persatuan dan keseragaman, tetapi keragaman dan harmoni yang harus berkuasa dalam masyarakat.

Keragaman budaya dan sejarah Ukraina—seperti halnya negara-negara pasca-Soviet lainnya, melahirkan kecemasan yang meluas tentang kurangnya integrasi nasional yang dimana seharusnya integrasi nasional tersebut mengisi kekosongan ideologis yang tersisa setelah runtuhnya komunisme. Sejatinya, identitas nasional yang kuat dan stabil dibutuhkan untuk memberikan kohesi sosial dan membantu mengintegrasikan minoritas, dengan demikian menjamin integritas teritorial dan keamanan nasional. Konsolidasi demokrasi tidak dapat dicapai tanpa persatuan nasional yang didasarkan pada memori sejarah. Konflik Rusia Ukraina saat ini memperjelas bahwa disintegrasi Uni Soviet belum selesai. Wacana terbelahnya Ukraina telah mendominasi perdebatan sejak kemerdekaan di tahun 1991, menyandingkan wilayah barat Ukraina yang pro-Eropa sementara wilayah timur Ukraina yang pro-Rusia sebagai entitas sejarah dan budaya yang diinformasikan oleh ingatan kolektif yang saling bertentangan.

Dalam penelitian ini, penulis menawarkan dua (2) konsep sebagai pisau analisis lebih lanjut mengenai proses integrasi nasional dalam pembangunan bangsa Ukraina. Konsep yang pertama; elit politik memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional dengan mempromosikan simbol budaya dan narasi sejarah pilihan mereka yang sesuai dengan situasi nasional. Penulis menawarkan pemikiran Shevel (2011:137) yang menjelaskan bahwa penerapan paksa kesamaan ideologis tidak dapat diterapkan antara dua prinsip utama yang saling berkontradiksi. Ketika politik Ukraina berkembang menjadi permainan *zero-sum*—belum lagi pemicu utama *Euromaidan* adalah keberpihakan satu sisi pemerintah sebelumnya, Viktor Yanukovych terhadap poros-Timur, maka diperlukan kebijaksanaan pemerintah pusat yang baru untuk merangkul masyarakat Ukraina bagian timur dalam membangun integrasi nasional. Demikian diperlukan kebijaksanaan tersebut dilatarbelakangi atas tindakan preventif pemerintah baru untuk mengaburkan situasi yang saling berkontradiktif khususnya diantara masyarakat Ukraina bagian timur dengan Ukraina bagian barat.

Konsep yang kedua; penulis menawarkan pemikiran Suny (1999:139) sebagai pisau analisis selanjutnya, yaitu bahwa integrasi nasional terbentuk dalam ruang dan waktu historis yang actual, berkaitan dengan isu; ekonomi, politik, dan budaya yang berkembang. Suny (Ibid.) menawarkan studi kasus republik Kaukasia pasca-Soviet. Dalam penelitiannya, Suny (Ibid.) menunjukkan identitas nasional dan konseptualisasi kepentingan dapat berubah dengan cepat dalam momen politik yang dipicu atas urgensitas, seperti contoh kasus; kemenangan atau kekalahan militer ataupun pemisahan diri juga pendudukan kekuatan asing di sebagian wilayah kedaulatan negara. Berkaitan dengan pendapat Suny (Ibid.) Momentum *Euromaidan* yang mengiringi Aneksasi Krimea dan perang di Donbas telah memicu perubahan mendasar dalam identitas kolektif dan kemungkinan akan berdampak pada konseptualisasi integrasi nasional Ukraina. Intervensi asing dan ancaman keamanan nasional Ukraina menjadikan proses integrasi nasional semestinya berlaku di Ukraina, pasalnya jika melihat eskalasi konflik di Ukraina, bukan hal yang mustahil bahwa nasionalisme akan tumbuh dengan sendirinya mengingat tingkat urgensitas atas isu ini yang sangat tinggi.



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

1.6. Definisi Konseptual

Konsepsi sistem politik internasional yang bersifat anarki seringkali ditafsirkan dengan perubahan kondisi hubungan luar negeri antar negara yang bersifat dinamis dan aktual. Penulis menawarkan tiga (3) paradigma yang akan dielaborasi dengan kondisi konflik Ukraina, ketiganya:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*)

Konsep kedaulatan berkembang pada periode abad ke-16 yang populer terhadap isu kontrol kawasan berdasarkan territorial. Konsep ini lalu berkembang dengan terciptanya sistem pemerintahan yang mengkonstruksi aturan hukum dan sanksi. Konsep kedaulatan memainkan otoritas tertinggi dari kepemilikan wilayah tertentu sehingga suatu negara berhak untuk mengatur urusan dalam negeri maupun hubungan luar negeri. Pada hakikatnya kebebasan tersebut tidak dapat diintervensi oleh negara lain bagaimanapun caranya (H. J. Morgenthau & K. W. Thompson, 1978: 247-248). Kondisi ini memungkinkan negara untuk memiliki kebebasan tidak terbatas dalam menentukan nasib bagi bangsanya sendiri. Dalam konflik Ukraina, faktor moralitas dan kebiasaan (*custom*) kebijakan luar negeri mereka yang selalu mementingkan Rusia akan mempengaruhi kedaulatan bangsa. Pemimpin Ukraina sebelum momentum *Euromaidan* memainkan peran signifikan dalam memberi celah terhadap Kremlin untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan Ukraina—salah satunya melalui monopoli gas dan kekuasaan.

2. Power

Konsepsi kekuatan (*power*) menurut Rourke (1986: 230) adalah semua variabel—tidak selalu berhubungan dengan variabel militer yang dimiliki oleh suatu negara yang dapat digunakan oleh negara tersebut untuk mencapai tujuannya bahkan jika tujuan tersebut bertentangan moralitas dan kebiasaan negara tersebut. Kekuatan merupakan ciri dari negara berdaulat. Pada umumnya negara akan berusaha menciptakan kondisi perdamaian internal dan eksternal mereka. Dalam beberapa kasus tidak jarang ditemukan negara yang menggunakan akses kekuatan ini untuk menghalau kelompok-kelompok anarkis yang mengancam stabilitas dalam negeri. Negara di sini berperan sebagai aktor utama diwajibkan untuk menggunakan kebijakannya dan alat militer—

bila memungkinkan yang dimilikinya untuk melawan pelaku yang mengancam perdamaian. Dalam konflik Ukraina, variabel dari konsepsi kekuatan yang mereka miliki adalah pilihan untuk membentuk integrasi nasional demi menciptakan pembangunan bangsa.

3. Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Kepentingan nasional sebagai sebuah hal yang bersifat dinamis dan aktual. Konsep kepentingan nasional merupakan indikator yang menilai suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara rawan konflik atau tidak, untuk itu kondisi suatu bangsa dapat dengan mudah mempengaruhi kepentingan nasional mereka. Apabila negara diharuskan untuk mengambil kebijakan yang memiliki urgensi, maka moralitas tersebut akan dikesampingkan demi mencapai kepentingan nasional meskipun tidak jarang akan menimbulkan konflik. Tindakan yang bersifat kesejahteraan bangsa dan keamanan secara kolektif tentunya akan lebih diutamakan oleh negara, meskipun dalam mencapai tujuan tersebut akan menciptakan kondisi yang tidak aman atau tidak sesuai dengan kedudukan negara dalam sistem politik internasional (Sihombing, 1984: 43-44). Sehubungan dengan konflik di Ukraina, stabilitas dalam negeri merupakan kepentingan nasional yang utama untuk diselesaikan. Kesejahteraan rakyat yang terancam, perpolitikan dalam negeri yang keruh, dan juga ancaman intervensi asing terhadap kedaulatan negara, mengharuskan Ukraina untuk mengesampingkan aspek moralitas dan kedudukannya.

1.7. Definisi Operasional

Dalam merumuskan sebuah kebijakan luar negeri, suatu negara mempertimbangkan sarana terbaik agar kepentingan (*interest*) mereka dapat tercapai dengan baik. Menurut Holsti (1970: 130–192) perumusan kebijakan luar negeri dapat tercipta melalui sarana yang digunakannya, yaitu:

1. Diplomasi

Merupakan upaya pemerintah untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan nasionalnya, rasionalisasi kepentingan tersebut, ancaman, janji, dan kemungkinan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima dalam suatu isu kepada pemerintah negara lain. Diplomasi pada hakikatnya merupakan proses negosiasi dimana pemerintah

melakukan tawar-menawar (*bargaining*) dalam suatu isu tertentu demi mencapai kepentingan nasional secara optimal melalui sarana resmi yang telah disepakati. Dalam hal ini, faktor ketetapan yang telah dibahas sebelumnya bukan merupakan unsur utama bagaimana diplomasi dapat tercipta. Ketidakpastian sistem politik internasional sejatinya dapat merubah hubungan suatu negara dengan negara lainnya, mungkin di suatu rezim pemerintahan sebelumnya kedua negara bersahabat baik, namun di rezim lainnya kedua negara menjadi musuh.

2. Ekonomi

Merupakan upaya-upaya pemerintah untuk memanipulasi transaksi ekonomi internasional demi mencapai tujuan-tujuan nasionalnya. Bentuk manipulasi ini dapat berupa imbalan (*rewards*) maupun paksaan (*coercion*). Sebagai suatu sarana pemaksa, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk memaksa pemerintah asing mengubah kebijakannya yang berkaitan, baik domestik maupun luar negeri agar sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah yang melancarkan ancaman tersebut. Sedangkan sebagai sarana imbalan, maka transaksi ekonomi internasional digunakan untuk mendukung agar pemerintah asing melakukan atau terus berbagai tindakan yang diinginkan pemerintah yang melancarkan imbalan, perilaku ini biasanya tercipta dalam hubungan kerja sama yang memiliki jangka waktu panjang. Poros Barat membantu Ukraina melalui stabilisasi negara dan ancaman sanksi ekonomi terhadap Rusia.

3. Militer

Merupakan upaya-upaya pemerintah suatu negara untuk mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara lain dengan menggunakan ancaman dan atau dukungan militer. Sarana militer lazim ditemui pada negara-negara yang berada dalam situasi konflik, tentunya intervensi militer tidak dapat dikategorikan sebagai intervensi apabila negara tuan rumah mengizinkan. Ukraina dikategorikan sebagai negara yang belum mempunyai kekuatan militer yang besar, tentunya hal ini akan menjadi ancaman serius apabila konflik senjata terjadi dan mengancam kedaulatan mereka. Untuk itu, kerja sama di bidang militer dengan aktor eksternal sangat penting untuk dilaksanakan.

1.8. Hipotesis

Euromaidan hadir sebagai sarana perubahan politik luar negeri Ukraina dan juga posisi mereka dalam sistem politik internasional khususnya dalam skema perebutan klasik ideologis poros Barat yang membawa perspektif idealisme kebebasan, dan juga poros Timur yang membawa perspektif kesejahteraan kolektif berlandaskan historis. Stabilitas Ukraina yang memicu *Euromaidan* tentunya mengancam integrasi nasional bangsa Ukraina dan juga intervensi asing bagi politik luar negeri Ukraina, hasil diantaranya;

1. Intervensi Rusia di wilayah timur Ukraina sebagai respon terhadap *Euromaidan* dan lengsernya Viktor Yanukovych—Presiden yang menjalin hubungan erat terhadap politik luar negeri Rusia.
2. Perebutan kekuasaan yang semakin terlihat antara poros Barat dan poros Timur
3. Lahirnya integrasi nasional Ukraina melalui pemerintahan yang baru pasca-*Euromaidan*.

Dalam penelitian ini, hasil dari pengambilan keputusan pemerintah Ukraina pasca-*Euromaidan* dimaknai sebagai upaya Ukraina dalam mempertahankan keberlangsungan hidup rakyat (*national survival*), untuk itu pengambilan langkah politik luar negeri diluar kebiasaan (*out-of-ordinary-actions*) merupakan sebuah cerminan Ukraina dalam mengesampingkan moral, posisi, dan sikap dalam politik luar negeri mereka, karena secara aktual, urgensi dalam membentuk integrasi nasional untuk membangun bangsa memiliki kecenderungan yang tinggi.

1.9. Metodologi Penelitian

Penulis menawarkan tipe penelitian kualitatif dalam membedah rumusan masalah. Sejatinya, tipe penelitian ini bersifat eksplorasi karena penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman (*understanding*) tentang alasan, opini, dan motivasi yang mendasari suatu perilaku serta untuk memberikan penjelasan rinci dan lengkap terhadap topik penelitian. Penelitian kualitatif mencakup penelitian dan pengumpulan berbagai macam material empiris seperti studi kasus, observasional, sejarah, interaksional, dan teks-teks visual yang menggambarkan sebuah momentum yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna (*meaning*) yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap

berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Dalam penelitian ini, variabel akan dibatasi pada perebutan kekuasaan antara poros Barat dan poros Timur di Ukraina pasca *Euromaidan* dan bagaimana penerapan integrasi nasional di Ukraina.

1.10. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunannya penelitian ini akan terbagi kedalam empat (IV) Bab utama: Bab I, berisi Pendahuluan yang membahas Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Pemikiran; Hipotesis; Metodologi Penelitian; Sistematika Penelitian. Bab II, akan membahas permasalahan domestik Ukraina yang menyebabkan *Euromaidan* dan bagaimana perebutan kekuasaan berlaku disana, Bab III, akan membahas temuan penelitian ini sebagai uraian lebih lanjut dari hipotesis, yaitu dampak dari *Euromaidan*, berupa proses integrasi nasional bangsa Ukraina yang meliputi bahasan mengenai; bagaimana proses terciptanya solidaritas nasional dengan mengesampingkan perebutan kekuasaan asing di Ukraina. Harapannya dalam Bab ini dapat memberikan makna penelitian yang berkaitan dengan; arti pentingnya integrasi bangsa dan perlunya kehati-hatian politik luar negeri Ukraina dalam memilih aliansi. Bab IV, merupakan kesimpulan berisi intisari dari berbagai temuan dan hasil diskusi pada penelitian ini.